BAB III

UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

1. Profil Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur atau biasa disebut PPT adalah sebuah lembaga fungsional yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Polda Jawa Timur bersama lembaga masyarakat untuk memberikan layanan bersifat terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi medis, psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis rumah sakit.

Berdasarkan keterangan PPT dibentuk karena banyaknya korban kekerasan perempuan dan anak yang tidak tertangani. Pada tahun 2002 secara Nasional pemerintah merasa terlalu banyak masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan masalah tersebut seringkali dilaporkan ke kantor polisi yang pada akhirnya membuat para anggota kepolisian menjadi "kewalahan" dikarenakan terlalu banyak kasus kekerasan yang dilaporkan. Oleh karena itu dirasa perlu adanya lembaga yang dibentuk secara khusus untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.[1] Kronologi terbentuknya PPT Polda JATIM adalah sebagai berikut:[2]

a. Tahun 2002 di rumah sakit HS Samsoeri Mertojoyo berdiri instalasi pusat layanan terpadu yang menangani khusus korban kekerasan perempuan dan anak. Di bentuknya pusat layanan terpadu ini karena sebelumnya telah ada layanan crisis

[1] Luki, *Wawancara,* 7 April 2016
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

center, namun tidak berjalan karena tidak adanya keterpaduan antara unsur medis, penegakan hukum dan psikososial.

b. Dalam perkembangan selanjutnya telah dilakukan advokasi kebijakan, pertemuan-pertemuan, diskusi, workshop, penggalangan jaringan serta sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antara lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan.

c. Pada tanggal 13 September 2003 telah disepakati struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jatim.

d. Pada tanggal 20-21 Oktober 2003 dilaksanakan sidang pleno Pusat Pelayanan Terpadu yang dihadiri 16 Lembaga yaitu: Bapeprop Jatim, Bapemas Prop Jatim, RS Bhayangkara Surabaya, Dinas Kesehatan Prop Jatim, Dinas Sosial Prop Jatim, Ditreskim Polda Jatim, RS. DR Soetomo Surabaya, Samitra abhaya-KKPD, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Yayasan Anak Lintang (Alit), Savy Amira WCC (Woman Crisis Center), Yayasan Genta, LBH Tiara Yustisia, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo, Jombang WCC, Dian Mutiara WCC, BKOW, SD Impres Jember. Pada siding pleno tersebut telah menghasilkan standar Operasional dan prosedur layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta garis-garis besar kebijakan organisasi.

e. Pada bulan Desember 2003 atas alokasi dana APBD sebesar Rp 300. 000. 000 (tiga ratus juta rupiah) mulai dibangun gedung PPT Provinsi Jatim dan selesai pada bulan April 2004, kemudian pada bulan April sebesar Rp 30. 000. 00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengisian gedung.

d. Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 PPT sudah menangani macam-macam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 330 kasus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, PPT berprinsip memberikan pelayanan yang adil dan transparan, pelayanan yang terpadu dan setara kepada semua pihak, pelayanan yang sederhana (tidak berbelit-belit) dan menjaga kerahasiaan para pihak, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para korban kekerasan. Semua pelayanan tersebut diberikan secara gratis kepada semua perempuan dan anak korban kekerasan yang datang ke PPT Jawa Timur.

2. Landasan Hukum PPT

Sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah Pronvinsi Jawa Timur, landasan hukum berdirinya PPT Jawa Timur mengacu pada:

a. SK Gurbernur Tahun 2014 (SK mulai dari tahun 2004 yang diperbarui setiap tahun) tentang pengurus PPT dan mandat yang diberikan untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan responsife gender.
b. SK Gurbernur Jawa Timur sejak tahun 2004 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) perempuan dan anak Jawa Timur.
c. Perda Jawa Timur No.16 Tahun 2002 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
d. PerGub Jawa Timur No.53 Tahun 2014 tentang juklak Perda Jatim No.9 Tahun 2005.

3. Visi dan Misi PPT

Sebagai lembaga yang dibentuk secara khusus, tentunya PPT memiliki Visi dan Misi untuk mencapai tujuan didirikannya lembaga PPT Jawa Timur, yakni:

<u>Visi PPT:</u>

Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi PPT:

a. Mengupayakan keterpaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan layanan terpadu dengan menyederhanakan prosedur layanan.
b. Memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan memperhatikan hak-hak korban, dengan layanan berupa:
   1.) Layanan medis dan medikolegal
   2.) Layanan psikososial (konseling, psikoterapi), layanan dan pendampingan hukum, penyediaan rumah aman (shelter)
   3.) Pelatihan kemandirian

4. Fungsi dan Peran PPT Jawa Timur

Adapun fungsi dan peran PPT sebagai lembaga pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

Fungsi:

1. Memberikan layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempun dan anak korban kekerasan.
2. Memberikan layanan psikososial terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya.
3. Memberikan layanan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami.

Peran:

Lembaga sosial non profit yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Susunan Pengelola PPT Jawa Timur

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188 /121 /KPTS/ 013 / 2005 Tanggal 28 April 2005, susunan keanggotaan pengelolah PPT, terdiri dari:

Perlindungan : Gubernur Jatim

Wakil Gubernur Jatim

Kapolda Jatim

Pembina : Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur

Kepala BAPEMAS Jatim

Kepala BAPEPROP. Jatim

KADINSOS Jatim

KADINKES Jatim

KADISNAKER Jatim

KADIS P dan K Jatim

KAKANWIL Departemen Hukum dan HAM Jatim

DIR. RS DR Soetomo Surabaya

KABIDDOKKES Polda Jatim

DIR Reserse Polda Jatim

KA Biro Mental Spiritual Sekda Provinsi

KA Biro Kesejahteraan Rakyat SEKDAPROP. Jatim

Ketua : KA Rumkit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak BPPKB Prov Jatim

Anggota : Seluruh Jejaring

Pelaksana Harian PPT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) 1 Pejabat ketua tim Pengelola : KKARUMKIT/SPPD/KOMBES

b.) 1 orang KALAKHAR : DRG/AKBP

c.) 1 orang urusan administratif : SPRG/KOMPOL

d.) 1 orang adm. Keuangan : D3/3C

e.) 1 orang advokat : S2 Hukum/AIPTU

f.) 1 orang urdal : S1/3C

g.) 1 orang petugas Triase : SMA/KOMPOL

h.) 1 orang koordinasi divisi layanan : S2 SH/PUNA PNS

i.) 1 orang koordinasi advokasi : S1 DRS/LSM

j.) 1 orang koordinasi Humas Bhayangkari : S1 Psikologi

k.) 4 orang sosial worker :

S2 Psikologi (1/LSM)

S1 Psikologi (1/LSM)

S1 IAIN (1/LSM)

S1 Sarjana Hukum (1/Umum)

6. Pembagian Seksi dan Program-program Dalam PPT Jawa Timur

PPT Jawa Timur membagi seksi kegiatan dalam 5 bagian, yakni seksi humas, seksi advokasi dan diklat, seksi layanan medis dan medikolegal, seksi psikososial, seksi layanan hukum. Adapun tugas dan program masing-masing seksi dalam PPT adalah sebagai berikut:

a. Seksi Humas

Dalam menjalankan tugasnya seksi humas memiliki fungsi sebagai:

1.) Mensosialisasikan PPT dalam bentuk apapun. Seperti menyebarkan brosur, siaran radio setiap hari Rabu minggu ke satu dan ketiga di RRI Pro 1 FM jam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20.00 malam, Sosialisasi di sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan PPT, Telepon Sahabat Anak.

2.) Pantau Media, yakni mengumpulkan semua data yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara membuat kliping dari data yang diambil dari media cetak harian.

3.) Mengikuti pameran layanan publik tingkat Jawa Timur setiap satu tahun sekali.

4.) Selain tiga hal diatas, pengelolahan perpustakaan PPT juga menjadi tanggung jawab bagian kehumasan.

b. Seksi Advokasi dan Diklat

Fungsi utama bagian Advokasi ialah mengatur strategi agar korban-korban kekerasan terpenuhi hak-haknya. Seperti kasus korban kekerasan pemerkosaan terhadap anak sekolah hingga ia hamil, maka bagian advokasi akan megupayakan hak untuk sekolah bagi korban pemerkosaan dapat terpenuhi. Dan juga bagi anak-anak dipanti asuhan yang menjadi korban kekerasan dan tidak memiliki akta kelahiran, mereka juga akan diupayakan hak-haknya agar dapat terpenuhi. Adapun program-program yang dilaksanakan layanan seksi advokasi dan diklat antara lain:

1.) Workshop/pelatihan bagi pendamping

2.) Fasilitas pembentukan dan monitoring PPT untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur

3.) Bedah kasus

4.) Fasilitasi magang bagi mahasiswa

5.) Pemberdayaan korban kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

c. Seksi Layanan Medis dan Medikolegal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan dari seksi layanan medis dan medikolegal, tugas utama layanan medis ialah mengkoordinir korban kekerasan yang membutuhkan layanan medis. Korban-korban yang dilayani oleh PPT, bisa datang sendiri, diantar keluarga atau penyidik. Pelayanan medis ini diberikan secara gratis bagi mereka korban kekerasan karena PPT telah mendapat bantuan dari pemerintah, seperti visum dan penanganan luka. Namun untuk kasus tertentu tidak dapat diberikan secara gratis karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi, seperti tes DNA. Beberapa program layanan medis dan medikolegal adalah berikut:

1.) VeR oleh dokter umum atau spesialis

2.) IRD

3.) Rawat inap

4.) Rawat jalan

5.) Pemeriksaan penunjang (Lab, Rontgen, USG)

6.) Operasi atau anastasi

7.) VCT HIV-AIDS

d. Seksi Psikososial

Layanan psikososial diberikan oleh petugas yang bertanggung jawab guna menunjang pemulihan psikis akibat trauma atau penguatan atas kasus yang sedang dihadapi. Adapun beberapa program layanan yang diberikan oleh seksi psikososial adalah:

1.) Konseling psikologi

2.) *Home visite*

3.) Pendampingan bagi korban pada saat sidang

4.) Saksi ahli

5.) Psikoterapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.) *Shelter*

7.) *Tracking* (penelusuran alamat bagi korban trafiking)

e. Seksi Layanan Hukum

Korban mendapatkan layanan hukum berupa mediasi dan konsultasi hukum dengan pendampingan oleh pengacara. Berikut adalah beberapa program yang dijalani seksi layanan hukum:

1.) Konsultasi hukum

2.) Mediasi

3.) Pendampingan hukum

4.) Investigasi

5.) Dukungan pendaftaran acara

B. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di tangani PPT Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data laporan terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur Menunjukkan bahwa jumlah kasus yang masuk setiap tahun selalu mengalami peningkatan yakni tahun 2013 ada sebanyak 147 kasus KDRT, tahun 2014 sebanyak 173 kasus serta di tahun 2015 meningkat lagi sebanyak 197 kasus baik yang menimpa orang dewasa maupun anak-anak.

Berdasarkan keterangan staff PPT Jawa Timur, kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak ditangani PPT Jawa Timur terjadi di Kota Surabaya. Sejak Januari hingga Maret 2016, ada 24 laporan kekerasan anak. Sementara pada April hingga pertengahan Mei 2016, sudah ada dua kasus kekerasan anak yang ditangani Polrestabes Surabaya Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jwa Timur Kekerasan identik dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penganiayaan fisik seperti pemukulan, pemaksaan hubungan seksual serta termasuk didalamnya adalah kekerasan batin serta mental (psikis).

Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani PPT Jawa Timur:

TABEL 1

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

JENIS KEKERASAN	2013		2014		2015	
	DEWA-SA	ANAK	DEWA-SA	ANAK	DEWA-SA	ANAK
FISIK/ANIAYA	52	7	79	2	63	7
PSIKIS	46	12	67	6	77	30
SEKSUAL	1	1	0	1	2	3
PENELANTARAN	13	15	8	10	2	13

Sumber Data: Dokumentasi PPT

Dari keseluruhan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani PPT sepanjang tahun terdapat beberapa macam kasus kekerasan yang ditemui, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Untuk mengetahui gambaran umum upaya pemenuhan hak anak korban kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah ditangani Pusat Payanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur, penulis menemukan informasi sebuah kasus pelecehan dan pemerkosaan terhadap seorang anak. Berdasarkan informasi yang diterima tentang upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan di PPT Jawa Timur, penulis memperoleh keterangan sebagai berikut:[3]

Korban seorang anak perempuan sebut saja Mawar [4] yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (Usia 14 Tahun) dan bertempat tinggal di Surabaya, ia merupakan salah satu korban yang pernah ditangani Pusat pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur yang ditangani pada bulan Februari tahun 2016. Bisa dibilang

[3]Staf PPT, *wawancara,* 20 April 2016

[4] Nama asli korban disamarkan untuk menjaga privasi korban dan kode etik penyelenggaraan PPT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawar merupakan sekian dari banyak korban yang telah ditangani PPT Jawa Timur pasca kekerasan yang dialaminya.

Mawar tinggal bersama ayah yang bekerja swasta dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari petugas yang menangani kasusnya, Mawar mengalami tindak kekerasan pencabulan dan pemerkosaan oleh ayahnya sendiri sejak usia empat tahun hingga terakhir dilakukan pada anggal 31 januari 2016.

Kronologis kejadian berawal ketika Mawar masih berusia empat tahun, saat itu ayahnya mulai meraba-raba bagian tubuh Mawar (dada dan kemaluan). Pada usia sepuluh tahun ketika Mawar mulai mestruasi, pelaku (ayah kandung) mulai berani melakukan tindak pemerkosaan dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Mawar. Dari waktu ke waktu Mawar yang mulai beranjak dewasa menyadari bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah perilaku yang seharusnya tidak ia dapatkan. Sehingga ia pernah berusaha menolak dan penolakan itu membuat pelaku marah dan selalu mengancam pergi dari rumah. Suatu kenyaatan yang membuat miris dalam kasus ini adalah bahwa ibu kandung Mawar mengetahui apa yang selama ini mawar alami. Namun dengan alasan tidak rela ayahnya pergi ibunya tidak dapat berbuat apa-apa untuk membela sang anak. Atas kejadian tersebut Mawar pun mengalami trauma yang sangat berat hingga ia takut untuk bertemu dengan ayahnya lagi.

Mendapati kasus yang dialami korban tersebut PPT Jawa Timur secara cepat bertindak menangani korban guna melindungi dia dari tindak kekerasan pelecehan dan pemerkosaan berikutnya oleh ayah kandung korban. Tindakan awal yang dilakukan terhadap korban adalah layanan medis guna memeriksa keadaan fisik korban, mengobati luka yang diderita dan melakukan visum untuk digunakan sebagai alat bukti.

Sesuai dengan tugasnya divisi layanan hukum bertindak sebagai pendamping dalam proses pelaporan perkara tindak kekerasan terhadap pihak yang berwajib guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjerat pelaku dengan hukuman yang pantas. Petugas divisi layanan hukum mendampingi korban dalam pemenuhan administrasi pelaporan perkara hingga diruang sidang.

Sejalan dengan divisi hukum, layanan terhadap korban juga dilakukan oleh divisi advokasi dan psikososial untuk memenuhi hak-hak korban yang tidak dapat terpenuhi karena perilaku kekerasan yang telah ia alami. Korban dirawat dalam ruang *shelter* yang berbentuk seperti ruang rawat inap sementara yang dilengkapi fasilitas seperti baju ganti, tempat tidur, televisi, kamar mandi makanan. Selama di *shelter* korban diberi bimbingan rohani dan konseling hingga kondisi psikis maupun fisik korban kembali pulih.

Petugas PPT menjalin koordinasi dengan sekolah tempat korban belajar untuk memastikan agar korban tetap mendapatkan hak untuk belajar di sekolah. Dengan koordinasi tersebut PPT berhasil mendapatkan pihak yang bisa mengasuh korban dengan baik yang bersedia menampung korban untuk tinggal bersamanya. Pihak tersebut adalah kepala sekolah tempat Mawar belajar. Petugas PPT terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan korban mulai dari awal korban diterima di PPT hingga korban telah tinggal dengan orang tua asuhnya sampai dirasa korban tidak membutuhkan pengawasan lagi.

Berdasarkan keterangan diatas Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur telah menjadi lembaga yang terpercaya untuk menangani anak korban kekerasan dan mengupayakan pemenuhan hak-hak korban dengan berbagai upaya dan koordinasi bersama jejaring-jejaring PPT Jawa Timur.

C. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayan Terpadu Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh setiap layanan divisi dengan tugasnya masing-masing yang meliputi:

1. Layanan dan pendampingan secara litigasi

   Prosedur layanan secara litigasi hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak di PPT Provinsi Jawa Timur adalah berikut:

   1.) Tindakan Awal Pada Korban

      a.) Pra Pengaduan

         Petugas PPT (Konselor) melakukan penguatan terlebih dahulu pada korban untuk menghadapi proses hukum.

      b.) Apabila korban sudah siap dan menginginkan kasusnya diteruskan ke proses hukum, maka layanan hukum PPT melakukan konsultasi hukum guna:

         i.) Mengidentifikasi permasalahan hukum korban sesuai kebutuhan atau keinginan korban dalam memilih bentuk penyelesaian atas kasusnya (jalur perdata, pidana, mediasi, atau investigasi).

         ii.) Memberikan gambaran atau informasi langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban berikut konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi.

         iii.) Membuat kronologi kasus untuk mengetahui kasus posisinya.

         iv.) Untuk kasus anak sebagai korban diperlukan *inform consens* (persetujuan) dari orang tua atau walinya.

   2.) Pengaduan Secara Pidana

      a.) Petugas PPT (dalam hal ini layanan hukum menghubungi atau mengantarkan korban ke SPKT (Sentra Pelayanan Khusus Terpadu) untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat Laporan Polisi (korban mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL).

b.) Atas dasar Bukti Laporan Polisi tersebut pihak Kepolisian mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) serta melakukan pemeriksaan Medicolegal membuatkan surat permintaan VER (*Visum Et Repertum*) kemudian membawa korban ke UGD/PPT untuk di Visum (untuk kasus kekerasan fisik, pencabulan perkosaan) dan apabila kasus yang terjadi adalah kekerasan psikis, maka VER adalah VER pemeriksaan Psikiatri (oleh dokter Psikiater).

c.) Petugas Kepolisian membawa korban keruang penyidikan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) atau saat ini Unit PPA untuk dilakukan pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)/korban diminta keterangan atas laporannya sebagai saksi korban. Untuk korban anak dapat dilakukan proses pemeriksaan/pembuatan BAP di PPT.

d.) Petugas Kepolisian melakukan koordinasi dengan Tim Medikolegal (Dokter dalam kaitannya dengan VER/Lab dan Pengacara/Konselor dalam kaitannya dengan Pendampingan Psikologis).

3.) Pengaduan Secara Perdata:

a.) Pendaftaran gugatan/permohonan (cerai, hak asuh anak, nafkah).

b.) Pembuatan Jawaban atas gugatan /permohonan.

c.) Mewakili/Pendampingan korban di Pegadilan (PA/PN).

4.) Penanganan Lanjutan:

a). Pasca Penyidikan

i). Pada saat setelah proses penyidikan selesai (BAP saksi korban, saksi-saksi, tersangka serta barang bukti), maka dilakukan pemberkasan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Polisi/penyidik untuk selanjutnya Berkas Perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum).

ii). Perlu dilakukan Pendampingan hukum korban dan Psikologis (anak yang menjadi korban) serta melakukan monitoring kasus terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus (Proses Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Proses Persidangan di Pengadilan).

iii). Selain itu perlu juga dilakukan upaya Psikososial (recovery/pemulihan) pada korban.

iv). Reintegrasi (pemulangan korban) khususnya bagi korban Traffiking bekerjasama dengan instansi/dinas terkait (Dinsos, Disnaker).

2. Pendampingan dan layanan non litigasi

Pendampingan secara non litigasi dilakukan oleh beberapa divisi selain layanan hukum yang meliputi:

a.) Layanan Medis dan Medikolegal

Layanan medis di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit setempat. Layanan medis artinya memberikan pelayanan secara medis sehubungan dengan keluhan fisik yang dialami oleh anak korban kekerasan. Anak korban kekerasan yang mengalami luka-luka dapat langsung ditangani oleh dokter sesuai dengan kebutuhan korban masing-masing.

Dokter wajib membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban kekerasan dan visum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti dalam persidangan. Alat butki keterangan medis dari dokter akan menjadi pendukung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat bagi korban untuk melaporkan pelaku tindak kekerasan yang dalam hal ini dibantu oleh layanan divisi hukum PPT Jawa Timur.

Kesehatan dan pemulihan anak secara fisik maupun psikis merupakan tujuan utama dari layanan medis dan medikolegal. Untuk mendukung tujuan tersebut beberapa upaya tambahan dilakukan seperti memberi vitamin dan vaksin sebagai upaya pencegahan dari penyakit apabila dibutuhkan.

b.) Layanan Psikososial (Konseling Psikoterapi)

Layanan ini sangat berperan penting dalam tujuan pemulihan dan penguatan mental terhadap korban serta memberikan penjelasan tentang hak-hak korban untuk selalu didampingi pada setiap proses pemeriksaan dan pengadilan jika kasusnya berlanjut ke meja hijau, selain itu melalui bimbingan konseling PPT Memberikan bimbingan rohani bagi korban yang dalam kondisi mental tertekan. Bimbingan rohani/keagamaan diberikan kepada korban sebagai penguatan secara psikis.

Petugas Layanan Psikososial akan melakukan pendekatan terhadap anak korban kekerasan guna menggali secara mendalam tentang kronologis kasus dan menguatkan mental anak korban kekerasan untuk mencegah timbulnya efek trauma yang mendalam atas tindak kekerasan yang dialami.

Berdasarkan keterangan Bu Yanti Selaku Psikolog PPT menjelaskan bahwa dalam proses hukum, untuk konseling pada pelaku di lakukan oleh pengacara atau kuasa hukumnya jadi bukan dari aparat hukum karena prosedur hukum yang harus dilalui oleh pelaku. Tapi di pihak LSM yang konsern pada konseling laki-laki ada beberapa seperti PKBI Jatim, PPT Jatim dan PPT Gresik yang berusaha akan mencanangkan "*Men's Program*" dalam waktu dekat.[5]

[5] Yanti, *Wawancara,* 10 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memberikan layanan konseling pada korban pelecehan seksual maupun korban pemerkosaan dapat dilakukan dengan melalui surat, telepon, dan juga bertemu secara langsung dengan konselor dari PPT. Apabila dirasa kondisi korban terlalu tertekan karena trauma karena kekerasan yang dialami, maka korban dapat ditempatkan di *shelter* (rumah aman) guna mendapatkan perawatan psikis secara rutin.

c). Penyediaan ruang rawat inap sementara (*Shelter*)

Shelter (rumah aman) bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya rehabilitasi sosial agar korban bisa kembali kemasyarakat seperti semula. Proses rehabilitasi ini merupakan suatu usaha untuk memperjuangkan korban yang awalnya dalam kondisi tidak berdaya, baik secara psikis yang diakibatkan oleh tekanan batin yang terlalu kuat dengan diberikan pesan-pesan moral dan keagamaan, motivasi yang menjadi penguat serta keterampilan agar korban menjadi lebih baik. Penyediaan *shelter* didukung dengan berbagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari korban seperti pakaian, makanan dan minuman, ruang sholat, kamar mandi, dapur, televisi, dan tempat tidur.

d). Upaya gabungan divisi advokasi dan psikososial

Upaya yang dilakukan oleh divisi advokasi dan psikososial pada praktiknya adalah bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bidang selain kesehatan dan hukum. Layanan ini dilakukan untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seperti hak pendidikan.

Dalam hal ini divisi layanan yang bersangkutan akan mecarikan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aman bagi anak korban kekerasan apabila dibutuhkan. Upaya koordinasi dengan berbagai pihak akan dilakukan demi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan hak korban untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Selain pendidikan, kedua divisi layanan ini dengan kerjasama seluruh petugas PPT juga dapat mencarikan tempat tinggal yang aman bagi anak-anak korban kekerasan apabila dirasa keamanan mereka terancam oleh pelaku atau gangguan lingkungan sekitar. Apabila korban telah cukup lama tinggal di ruang *shelter* dan masih membutuhkan perlindungan, maka korban dapat ditempatkan di panti asuhan anak yang telah menjadi mitra PPT Jawa Timur sehingga keamanan korban dapat selalu dipantau oleh pihak PPT yang dalam hal ini akan berlaku sebagai wali korban.

Pendampingan dan layanan juga diberikan kepada korban anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Dalam hal ini PPT akan melakukan upaya koordinasi dengan dinas pencatatan yang terkait guna didapatnya akta kelahiran bagi anak korban kekerasan sebagai legalitas identitasnya selaku warga negara.[6]

Berikut ini Alur Penanganan Korban :

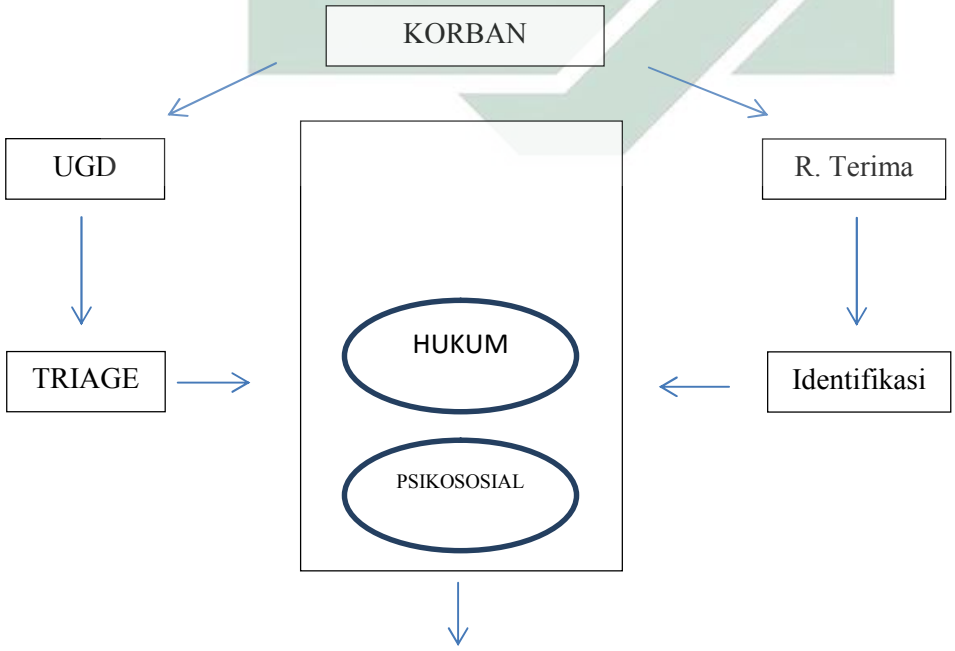

[6] Nina, *Wawancara,* 10 Mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

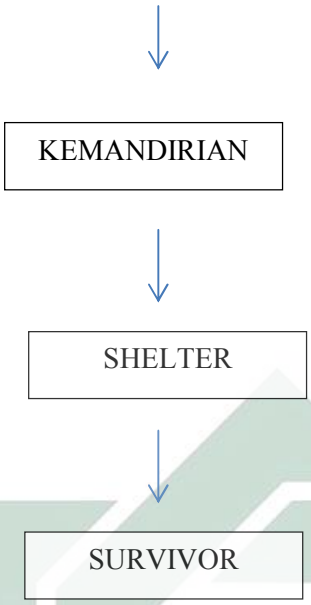

D. Proses Penjangkauan Korban

Dalam upaya penanganan PPT JATIM untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak korban kekerasan, ada beberapa macam prosedur penjangkauan korban hingga dapat tertangani oleh PPT:

a. *Hotline,* merupakan proses dimana korban dapat mengadukan masalahnya melalui telepon, e-mail maupun surat apabila korban belum berkesempatan hadir di kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), baik karena ancaman atau yang sebab lainnya.

b. *Droppin,* merupakan proses pengaduan secara langsung oleh korban dengan mendatangi kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk menceritakan duduk permasalahan yang dihadapinya .

c. *Home Visit,* merupakan upaya pendampingan dengan tujuan menjangkau korban secara proaktif kerumah ataupun ke kantor polisi.

Program *home visit* di Pusat Pelayanan Terpadu dilakukan oleh pendamping/konselor korban dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pasca kasus yang membelitnya, hal ini sebagai upaya memberdayakan korban baik memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguatan psikologis dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti PKK atau Dinsos.[7]

Hal yang perlu diperhatikan korban, apabila mengalami tindak kekerasan secara fisik yakni dengan segera melakukan :

a. Pelaporan ke kepolisian terdekat atau ke PPT atau jejaring PPT.
b. Mengamankan barang bukti berupa benda atau alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan.
c. Jika kekerasan seksual, segera lapor (sebelum 1 x 24) dengan pakaian dan kondisi pada saat kejadian tanpa harus mandi atau membersihkan badan dengan air terlebihan dahulu.[8]

A. Penghambat dan pendukung dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi jawa Timur.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur, ditemui beberapa pendukung dan penghambat terlaksananya maksud dan tujuan PPT. Adapun yang menjadi penghambat adalah:

Penghambat internal:

a. Jumlah anggota layanan hukum yang kurang yang mendampingi kasus yakni berjumlah 2 orang tidaklah sebanding dengan banyaknya kasus yang diterima oleh PPT.
b. Harus menjemput kasus yang kadang memerlukan waktu cukup lama, sedangkan waktu yang dibutuhkan penyelesaian kasus menyita banyak waktu.
c. Tingkat kerumitan masalah yang harus dipecahkan.

[7] Ibid
[8] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghambat eksternal:

a. Korban KDRT yang tidak meneruskan kasusnya untuk ditangani sehingga terkesan berlarut-larut.
b. Korban mengeluhkan Proses sidang di Pengadilan yang lama.
c. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti.
d. Kondisi psikologis korban yang lemah karena diancam.

Pendukung keberhasilan penanganan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan adalah:

a. Sumber daya manusia di PPT Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cukup profesional sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya sehingga dalam menangani korban tidak ada kendala secara prinsip karena pada dasarnya kebanyakan dari mereka berasal dari LSM dan yang banyak berpengalaman dalam menanggapi isu-isu seputar perempuan dan anak.
b. Sinergisitas kerja sama antar jejaring PPT Provinsi Jawa Timur yang secara prinsip banyak membantu dalam menangani berbagai macam kasus, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
c. Kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum dalam menangani anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id